

ABSTRAK

PENGARUH KEBIJAKAN POLISI SIBER INDONESIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT PENGGUNA MEDIA SOSIAL TWITTER

Oleh
JANUSI

Kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Mengenai hal tersebut, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang. Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, maka pada tahun 2021 Kepolisian Indonesia akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memasifkan sebuah kebijakan yaitu Polisi Siber / *Virtual Police*. Adanya kebijakan ini dinilai oleh sebagian pengamat dapat mengekang kebebasan berekspresi para pengguna media sosial, hal ini di ungkap oleh Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Profesor Heru Nugroho. Ia mengatakan bahwa akan muncul kekhawatiran nantinya jika penindakannya yang tidak tepat dan akan menghambat kebebasan pendapat dalam menyampaikan kritik dan saran di media sosial. Dalam Periode 23 Februari hingga 11 Maret 2021, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim menemukan 89 konten media sosial terverifikasi mengandung ujaran kebencian. Konten itu terbanyak dari media sosial *twitter*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan polisi siber indonesia terhadap kebebasan berpendapat pengguna media sosial twitter. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori panopticon, yaitu teori yang mengkonsepkan sistem pengawasan dan pendisiplinan. Penelitian ini menggunakan metode kuisisioner dengan sampel berjumlah 100 responden yang ditentukan dengan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan dengan uji T menyatakan variabel X berpengaruh sebesar 47,8% terhadap variabel Y, sedangkan sisanya 52,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hipotesis yang diajukan diterima dengan dibuktikan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $9,481 > 1,290$. Dimensi dalam kebijakan polisi siber Indonesia yang paling berpengaruh adalah memberi peringatan kepada masyarakat yang berperan sebagai upaya preventif supaya terhindar dari tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan – ketentuan ketika sedang berada dalam ranah dunia digital.

Kata kunci: Kebijakan Polisi Siber, Twitter, Kebebasan Berpendapat, Panopticon

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INDONESIAN CYBER POLICE POLICY ON FREEDOM OF OPINION OF THE SOCIAL MEDIA TWITTER USERS

By

JANUSI

Freedom of opinion is a freedom for every individual to express their ideas or to issue their ideas about something. Regarding this matter, it's clear that having an opinion or an idea is a freedom, so that opinion or ideas that being expressed by an individual is everyone's rights. In accordance with the Chief of Police Circular Number SE/2/11/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Create a Clean, Healthy, and Productive Indonesian Digital Space, in 2021 the Indonesian Police will work closely with the Ministry of Communication and Information to enforce a policy, named Cyber Police / Virtual Police. The existence of this policy is considered by some observer to repress the freedom of opinion of social media users. This was stated by a sociologist at the University of Gadjah Mada, Professor Heru Nugroho. He said that there will be concerns later if the action is improper and will repress the freedom of opinion in expressing criticism and suggestions on social media. In 2021, between February to March 11th, the Directorate of Cyber Crimes found 89 verified social media media content which is containing hate speech. Most of the content comes from Twitter. This study aims to determine how much influence the Indonesian cyber police policy has on the freedom of opinion in Twitter. The theory used in this study is the panopticon theory, which is a theory that conceptualize a system of supervision and discipline. This study uses questionnaire method with a sample of 100 respondents determined by Slovin formula. Based on calculations using the T test, it is stated that the X variable has an effect of 47.8% on the Y variable, while the remaining 52.2% is influenced by other factors not examined in this study. The proposed hypothesis is accepted with evidence that the value of t count is greater than t table, namely $9.481 > 1.290$. The most influential dimension in Indonesia's cyber police policy is to give warnings to the public who act as preventive measures to avoid actions that have the potential to violate provisions while in the realm of the digital world.

Keywords: *Cyber Police Policy, Freedom of Expression, Panopticon, Twitter*